



Kemendagri Tolak Koreksi APBD DPRD DKI Dituding Mbalelo

JAKARTA (Pos Kota) - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai penolakan Kemendagri untuk mengoreksi APBD 2015 karena DPRD DKI mbalelo.

Diakui Ahok, ada oknum DPRD yang sengaja memperkeruh suasana agar bisa memasukkan proyek atau kegiatan mereka ke dalam APBD.

"Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke Kemendagri bahwa yang dikirim dari kita enggak sah. Tapi harus dari mereka," pungkas Ahok di Balaikota, Senin (9/2).

Sebelumnya kalangan DPRD menuding bahwa draft APBD DKI 2015 yang tengah dikoreksi Kemendagri dituding bodong karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan.

Penilaian dilontarkan dua anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Bestari Baru dan Fahmi Zulfikar. "Draft anggaran disampaikan Pemprov DKI tidak sesuai dengan draft yang dibahas bersama di komisi-komisi dan di paripurna. Jelas itu pelanggaran hukum karena sesuai dengan aturan APBD diajukan setelah dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Jadi wajar kalau Kemendagri enggan mengoreksi dan pimpinan dewan enggan menandatangani draft tersebut," ujar Bestari dalam keterangan persnya, Senin (9/2).

Dalam kesempatan yang sama, Fahmi Zulfikar menegaskan sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota, sebagai tindak lanjut Dewan akan membentuk pansus dengan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk meminta penjelasan.

TAK SESUAI PEMBAHASAN

Fahmi menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan

hasil pembahasan dengan DPRD DKI di antaranya masalah alokasi anggaran pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

DPRD DKI menilai anggaran untuk KJP hanya dibutuhkan sekitar Rp1,8 triliun. Dengan asumsi jumlah siswa sebanyak 600 ribu siswa yang masing-masing memperoleh sekitar Rp3 juta pertahun. "Kenyataannya dalam draft itu tetap Rp4,9 triliun untuk KJP. Jadi apa artinya pembahasan dengan DPRD DKI," ungkap politisi Partai Hanura ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, membantah jika dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian 'bodong'. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen yang asli. "Dokumen yang dikirim sesuai kesepakatan bersama. Karena itu bagian, tak terpisahkan," kata dia. (guruh/o)